

Daftar Pustaka

1. Buku

- Arto, Mukti, 2008, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2015, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim Tinggi Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Damanhuri, A, 2012, *Segi – Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- _____, 2009, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Latif, Djamil, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II*.
- Manan, Abdul, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- MK, Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Satrio, J, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta.

Soepomo, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soeroso, R, 2012, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 5 Tentang Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soimin, Soedharyo, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, 2003, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.

2. Jurnal /Tesis

Daliansyah, M David, “Akibat Hukum Terhadap Anak Dan Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjungkarang”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

Puspitasari, Dewi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Dan Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makassar)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006.

Wardana, Wisnu, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

S, Bambang Sugeng Ariadi, “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono”, *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 29 No 1, Januari - April 2014

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
- Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.